



JAFM:
**Journal of Accounting and
Finance Management**

E-ISSN: 2721-3013
P-ISSN: 2721-3005

<https://dinastires.org/JAFM> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Luh Nopia Yudiastuti¹, Edy Sujana², Ni Kadek Sinarwati³

¹Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia, nopiyudiastuti@gmail.com

²Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia, edy.s@undiksha.ac.id

³Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia, nikadeksinarwati72@gmail.com

Corresponding Author: nopiyudiastuti@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to examine the effect of Regional Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) and Revenue Sharing Funds (Dana Perimbangan) on Local Government Financial Performance, with Capital Expenditure as a moderating variable. This research employs a quantitative approach using the Moderated Regression Analysis (MRA) method with STATA software. The population of this study consists of the financial reports of Regency and City Governments within the Bali Province. The sampling technique used is non-probability sampling with purposive sampling. The results indicate that Regional Original Revenue (PAD) has a positive and significant effect on Local Government Financial Performance. Revenue Sharing Funds (X2) have a negative and significant effect on Local Government Financial Performance. Furthermore, Capital Expenditure is proven to significantly strengthen the relationship between PAD and Revenue Sharing Funds with Local Government Financial Performance. A high level of economic growth in a region correlates with a high level of regional independence. Moreover, strategic investments in public service infrastructure can drive an increase in PAD in the future.*

Keyword: *Capital Expenditure, Regional Original Revenue, Revenue Sharing Funds, Local Government Financial Performance*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan software STATA. Populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah Provinsi Bali. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode penentuan sampel *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan (X2) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan penelitian ini Belanja Modal terbukti secara signifikan memperkuat pengaruh hubungan PAD dan Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jika pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah itu tinggi maka tingkat kemandirian daerah juga tinggi. Investasi yang cermat dalam infrastruktur pelayanan publik juga dapat mendorong peningkatan PAD di masa mendatang.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai wilayah, termasuk pulau, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Dalam aspek pengelolaan ekonomi, setiap wilayah memiliki kewenangan tersendiri berdasarkan prinsip desentralisasi yang diterapkan melalui kebijakan Otonomi Daerah sejak 1 Januari 2001. Sebelumnya, sistem pemerintahan yang berlaku dianggap kurang sesuai dengan dinamika masyarakat, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah menandai peralihan dari sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menuju desentralisasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta memperluas peran mereka dalam pembangunan. Selain itu, setiap wilayah diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya dengan mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, serta mempertimbangkan potensi dan keberagaman daerahnya.

Pada dasarnya, implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memiliki tiga misi utama, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya daerah; serta (3) memberdayakan masyarakat dengan membuka ruang partisipasi dalam pembangunan (Mardiasmo, 2020). Anggaran daerah berperan sebagai pedoman keuangan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan kepada publik. (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 2022) menegaskan pentingnya pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan keyakinan bahwa pemerintah kabupaten dan kota lebih memahami kebutuhan, potensi, serta aspirasi masyarakat setempat dibandingkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, penerapan otonomi daerah menuntut peningkatan kinerja serta akuntabilitas pemerintah daerah untuk mencapai tujuan desentralisasi kekuasaan.

Mekanisme utama dalam transfer keuangan antar pemerintah dilakukan melalui transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Berbagai skema transfer tanpa syarat (umum) digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal, sementara transfer bersyarat (khusus) bertujuan untuk membiayai layanan tertentu seperti pendidikan dasar, layanan sosial, dan infrastruktur jalan. Selain itu, dana perimbangan dimanfaatkan untuk mengurangi ketimpangan horizontal antar daerah (Capkova & Roncakova, 2014). Desentralisasi diharapkan mampu mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sehingga penyediaan layanan publik menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan serta kondisi ekonomi lokal (Akita dkk., 2021).

Kinerja keuangan memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan anggaran pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal. Baik pemerintah pusat maupun daerah,

serta para pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dengan mempertimbangkan potensi suatu wilayah dari aspek pendapatan dan pengeluarannya (Suandani & Astawa, 2021). Meskipun efektivitas kinerja pemerintah tidak selalu sesuai dengan ekspektasi publik, karena sering kali hanya menonjolkan keberhasilan program dan mengabaikan kegagalan, analisis kinerja pemerintah daerah tetap menjadi data yang sangat penting. Data ini berperan dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hamid, 2018). Oleh karena itu, alokasi dana yang digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta berorientasi pada kepentingan publik (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019). Kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa alokasi dana digunakan secara optimal untuk mendukung program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan layanan publik yang efisien, peningkatan kesejahteraan sosial, serta pemeliharaan infrastruktur. Untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dilakukan berbagai proyeksi guna mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan fiskal.

Salah satu aspek penting dalam pengukuran kinerja keuangan daerah adalah efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu memaksimalkan potensi sumber pendapatan lokal. Efektivitas ini diukur dengan membandingkan realisasi PAD terhadap target yang telah ditetapkan dalam anggaran. Menurut (Kou dkk., 2021) efektivitas PAD menjadi indikator utama dalam menilai kapasitas fiskal pemerintah daerah. Selain itu, efisiensi anggaran juga merupakan faktor esensial dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran secara optimal untuk menghasilkan output yang diharapkan. Efisiensi anggaran sangat penting agar belanja publik benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Wu dkk., 2020).

Proyeksi kemandirian keuangan daerah merupakan indikator utama yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasionalnya menggunakan pendapatan lokal tanpa bergantung secara signifikan pada transfer dari pemerintah pusat. Menurut (Maher dkk., 2020) rasio kemandirian fiskal yang tinggi menunjukkan stabilitas keuangan daerah serta kemampuan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan secara otonom. Indikator ini juga menjadi cerminan potensi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan. Penerapan otonomi daerah menuntut peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah agar tujuan desentralisasi dapat tercapai. Namun, realitas menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Oleh karena itu, proyeksi kemandirian keuangan daerah menjadi alat ukur penting dalam menilai kinerja keuangan, terutama dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi daerah memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara mandiri, tetapi kebebasan ini harus diimbangi dengan peningkatan akuntabilitas guna memastikan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Kemandirian keuangan mencerminkan sejauh mana daerah mampu memenuhi kebutuhannya tanpa ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat. Peningkatan kemandirian keuangan berhubungan erat dengan akuntabilitas pemerintah daerah, sehingga pengukuran proyeksi kemandirian keuangan menjadi penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara mandiri (Muliati dkk., 2024).

Tingkat kemandirian keuangan juga merupakan indikator penting dari keberlanjutan fiskal daerah, yang memastikan bahwa desentralisasi keuangan dapat berlangsung tanpa mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Keberlanjutan fiskal sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam mengurangi ketergantungan pada dana pusat (Aminuddin &

Winarningsih, 2024). Sebagai contoh, di Provinsi Bali, rasio kemandirian keuangan masih tergolong rendah, yang menunjukkan keterbatasan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi, sehingga menghambat kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah di Provinsi Bali dari tahun ke tahun tidak stabil dan cenderung menurun, terutama pada periode 2020–2021 akibat dampak pandemi Covid-19. Penurunan ekonomi yang signifikan menyebabkan keterbatasan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pemerintah kabupaten/kota di Bali semakin bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan analisis data, rata-rata Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) di Provinsi Bali selama periode 2019–2023 adalah 1,182. Angka ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang moderat secara keseluruhan, dengan variasi yang cukup besar antar daerah. Kabupaten Badung mencatatkan rata-rata KKD tertinggi sebesar 6,758, yang menunjukkan dominasi PAD dalam struktur keuangannya serta ketergantungan yang sangat rendah terhadap transfer pusat. Sebaliknya, Kabupaten Bangli, Jembrana, dan Karangasem memiliki rata-rata KKD di bawah 0,3, mengindikasikan ketergantungan fiskal yang sangat tinggi terhadap dana pusat. Sementara itu, Kota Denpasar memiliki rata-rata KKD sebesar 0,856, yang menunjukkan kapasitas fiskal yang relatif lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten lainnya. Kabupaten lainnya, seperti Buleleng, Klungkung, dan Tabanan, berada dalam kategori rendah hingga sedang dengan rata-rata KKD berkisar antara 0,3 hingga 0,5. Data ini menunjukkan adanya disparitas tingkat kemandirian fiskal di antara kabupaten/kota di Provinsi Bali, yang dipengaruhi oleh variasi kapasitas PAD dan tingkat ketergantungan terhadap transfer pusat.

Laporan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, berperan penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Gazzola et al. (2020) menyoroti bahwa transparansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah sangat krusial untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Transparansi ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Namun, banyak pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan, terutama dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang masih rendah menunjukkan bahwa daerah belum mampu secara optimal membiayai belanja daerahnya sendiri, sehingga ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat tetap tinggi. Ketidakmampuan ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah serta memperlambat pencapaian kemandirian fiskal. Akibatnya, daerah yang tidak mampu meningkatkan PAD-nya akan menghadapi risiko ketimpangan sosial dan meningkatnya kesenjangan kemiskinan, yang pada akhirnya dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam pembangunan daerah.

Ukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah sering kali dikaitkan dengan besarnya dana perimbangan yang diterima. Semakin besar alokasi dana perimbangan yang disalurkan ke daerah, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Namun, meskipun peningkatan dana perimbangan dapat mendukung program-program daerah, hal ini juga berdampak pada rasio kemandirian fiskal yang cenderung menurun. Ketika suatu daerah sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, tingkat kemandiriannya berkurang, yang mencerminkan keterbatasan dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatan sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana perimbangan digunakan secara efektif dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, akuntabilitas kepada pemerintah pusat menjadi aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah, guna memastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan meningkatkan kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan

terhadap transfer pusat, pemerintah daerah dapat memperkuat kemandirian keuangan dan mewujudkan tata kelola yang lebih berkelanjutan.

Diberlakukannya desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai sektor, terutama dalam sektor publik. Salah satu aspek utama dalam peningkatan pelayanan publik adalah pembangunan infrastruktur, yang berperan penting dalam menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Menurut (Panji & Indrajaya, 2016) peningkatan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur daerah secara signifikan berkontribusi terhadap pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah. Investasi dalam infrastruktur yang memadai tidak hanya mendukung penyediaan layanan publik yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan efisiensi di berbagai sektor serta mendorong produktivitas masyarakat. Dengan adanya infrastruktur yang baik, aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih lancar, akses masyarakat terhadap layanan publik meningkat, dan daya saing daerah pun semakin kuat. Oleh karena itu, kebijakan pengalokasian anggaran dalam desentralisasi fiskal perlu mempertimbangkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiskal daerah.

Inkonsistensi temuan dalam riset sebelumnya mendorong pentingnya penelitian ini untuk menguji peran belanja modal sebagai variabel moderasi dalam pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pemilihan belanja modal sebagai variabel moderasi didasarkan pada hubungannya yang erat dengan investasi di sektor-sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Belanja modal yang dialokasikan dengan tepat memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kinerja keuangan daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan setidaknya 40% dari total belanja daerah (di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan desa) untuk belanja infrastruktur pelayanan publik. Ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal yang efisien dalam pembangunan infrastruktur publik memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan desentralisasi fiskal, yang pada gilirannya juga akan meningkatkan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

Peraturan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan minimal 40% dari total belanja daerah untuk infrastruktur pelayanan publik memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur publik, yang meliputi jalan, jembatan, sistem air bersih, sistem sanitasi, sekolah, dan rumah sakit, merupakan fondasi penting dalam memperbaiki kualitas hidup penduduk daerah tersebut. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan standar hidup, kesehatan, dan pendidikan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan besar bagi banyak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dalam mencapai target alokasi minimum tersebut. Beberapa daerah mengalami kesulitan karena keterbatasan sumber daya, baik dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, faktor pengelolaan anggaran yang kurang efisien serta prioritas yang belum sepenuhnya fokus pada pembangunan infrastruktur publik juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran serta memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mencapai target alokasi belanja infrastruktur ini, sehingga pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai.

Pentingnya efisiensi dalam penggunaan dana publik, khususnya dalam alokasi untuk belanja modal, menjadi aspek utama yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan dana perimbangan dan PAD untuk belanja modal yang tepat

sasaran dapat memperkuat kinerja keuangan daerah dengan menciptakan dampak positif jangka panjang terhadap pendapatan masa depan. Sebaliknya, jika belanja modal tidak digunakan secara efektif, hal ini bisa mengurangi dampak positif sumber pendapatan terhadap kinerja keuangan dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Mengingat ketidakkonsistenan temuan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan belanja modal sebagai variabel moderasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara variabel-variabel tersebut dan kontribusinya terhadap pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, memperbaiki infrastruktur pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang pada gilirannya mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali. Terdapat 8 (delapan) Pemerintah Kabupaten dan 1 (satu) Pemerintah Kota yang dijadikan sampel penelitian dengan menggunakan laporan keuangan berupa APBD yang telah disusun oleh pemerintah daerah terkait dan telah terpublikasi pada situs resmi DJPK Kemenkeu Republik Indonesia di laman <https://djpk.kemenkeu.go.id>.

Populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Bali berupa APBD yang dipublikasikan dengan periode tahun 2019-2023. Penelitian ini menggunakan periode 2019-2023 untuk menjamin kelengkapan data pada APBD dan LRA Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Bali, sehingga tidak ada sampel yang tereliminasi karena adanya kemungkinan belum menyampaikan APBD dan LRA yang telah diaudit. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini yaitu 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali selama periode 2019-2023.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan memanfaatkan data laporan keuangan pemerintah kab/kota Provinsi Bali periode 2019 s/d 2023 yang telah tersedia sebagai informasi, data tersebut kemudian dikumpulkan dan dikaji. Data tersebut diperoleh dari resmi DJPK Kemenkeu Republik Indonesia di laman <https://djpk.kemenkeu.go.id>. Selain menggunakan metode dokumentasi, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka. Pengumpulan data atau informasi yang bisa dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari *literature* atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dapat diperoleh dari data sekunder yaitu *literature-literature*, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan bertujuan untuk mengetahui teori yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti serta jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Model penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan model statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Analisis regresi linear berganda bermaksud untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen bila dihubungkan dengan dua atau lebih variabel independen. Penelitian ini menggunakan alat pengolahan data yaitu dengan alat bantu software STATA versi 15.0. Keunggulan dari software STATA dibandingkan dengan alat lainnya yaitu STATA menggunakan perintah (*command*) yang berjenis syntax yang perintahnya tidak terbatas pada menu. Selain itu output yang dihasilkan juga terbagi pada masing-masing test sehingga mempermudah untuk melakukan interpretasi hasil pada software STATA. STATA

mendukung berbagai metode analisis statistik seperti regresi multivariat, analisis moderasi, dan meta-regression analysis (MRA). Dalam penelitian yang melibatkan hubungan kompleks seperti pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan dengan belanja modal sebagai moderator, STATA sangat ideal karena mendukung analisis interaksi secara langsung. STATA unggul dalam menangani data sekunder yang biasanya berbentuk time series, cross-sectional, atau panel data. Data pemerintah daerah sering berbentuk panel, sehingga fitur seperti fixed effects model dan random effects model di STATA memudahkan analisis. Penelitian yang menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah sering menggunakan data panel (gabungan data time series dan cross-sectional). STATA memiliki fungsi yang kuat untuk mengolah data panel, seperti estimasi fixed effects dan random effects.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tes Pemilihan Model Estimasi Common Effect Model (CEM)

Tabel 1. Hasil Uji CEM

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	45
Model	52.0026763	5	10.4005353	F(5, 39)	=	3279.61
Residual	.123679605	39	.003171272	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.9976
				Adj R-squared	=	0.9973
Total	52.1263559	44	1.18468991	Root MSE	=	.05631

y	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
x1	.9336619	.0346112	26.98	0.000	.8636541 1.00367
x2	-1.163809	.0698085	-16.67	0.000	-1.30501 -1.022608
z	.0407585	.0204252	2.00	0.053	-.0005553 .0820723
x1z	.0528793	.0189767	2.79	0.008	.0144954 .0912633
x2z	.0671697	.0249732	2.69	0.010	.0166568 .1176827
_cons	-.2101701	.1126258	-1.87	0.070	-.4379774 .0176372

Model estimasi ini merupakan model regresi yang paling sederhana, hanya menggabungkan data *time-series* dan *cross section* lalu mengestimasi dengan menggunakan pendekatan kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square/OLS*). Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan adalah sama dalam berbagai kurun waktu.

Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 2. Hasil Uji FEM

Fixed-effects (within) regression	Number of obs	=	45
Group variable: id	Number of groups	=	9
R-squared:	Obs per group:		
Within = 0.9576	min =		5
Between = 0.9987	avg =		5.0
Overall = 0.9968	max =		5
	F(5,31)	=	140.07
corr(u_i, Xb) = -0.6754	Prob > F	=	0.0000

y	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
x1	.9248768	.0780425	11.85	0.000	.765708 1.084046
x2	-1.189143	.0835369	-14.23	0.000	-1.359518 -1.018768
z	.0436251	.0303816	1.44	0.161	-.0183386 .1055888
x1z	.0300085	.0445854	0.67	0.506	-.060924 .120941
x2z	.0327313	.0603232	0.54	0.591	-.0902988 .1557613
_cons	-.2250529	.1616309	-1.39	0.174	-.5547012 .1045955
sigma_u	.05658256				
sigma_e	.05664818				
rho	.49942044	(fraction of variance due to u_i)			

F test that all u_i=0: F(8, 31) = 0.94 Prob > F = 0.4967

FEM merupakan model di mana setiap individu (*cross section*) memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun perbedaan tersebut diasumsikan dengan nilai konstanta (*intercept*) sehingga setiap individu (*cross section*) tidak berubah seiring waktu (*time series*) (Putri Anjarwati, 2021).

Random Effect Model (REM)

Tabel 3. Hasil Uji REM

Random-effects GLS regression		Number of obs	=	45
Group variable: id		Number of groups	=	9
R-squared:		Obs per group:		
Within	= 0.9547	min	=	5
Between	= 0.9997	avg	=	5.0
Overall	= 0.9976	max	=	5
corr(u_i, X) = 0 (assumed)		Wald chi2(5)	=	16398.05
		Prob > chi2	=	0.0000

	y	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]
	x1	.9336619	.0346112	26.98	0.000	.8658252 1.001499
	x2	-1.163809	.0698085	-16.67	0.000	-1.300631 -1.026987
	z	.0407585	.0204252	2.00	0.046	.0007259 .0807911
	x1z	.0528793	.0189767	2.79	0.005	.0156857 .0900729
	x2z	.0671697	.0249732	2.69	0.007	.0182232 .1161162
	_cons	-.2101701	.1126258	-1.87	0.062	-.4309127 .0105725
	sigma_u	0				
	sigma_e	.05664818				
	rho	0	(fraction of variance due to u_i)			

REM merupakan model di mana setiap individu (*cross section*) memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun perbedaan tersebut diasumsikan dengan nilai konstanta (*intercept*) sehingga setiap individu (*cross section*) tidak berubah seiring waktu (*time series*). Karena dalam REM terdapat dimensi individu dan waktu, yang artinya dalam asumsi dimasukkan *error term* (Putri Anjarwati, 2021).

Penentuan Model Estimasi

Ada tiga metode yang dapat digunakan untuk data panel dalam penelitian yaitu model regresi *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Untuk menentukan model estimasi yang terbaik dalam penelitian ini maka dilakukan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Largange Multiplier.

Uji Chow Test

Untuk memilih apakah *fixed effect model* (FEM) atau *common effect model* (CEM) yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel, maka diperlukan Uji Chow. Uji ini bertujuan untuk memilih manakah model yang paling baik di antara keduanya yaitu *fixed effect model* (FEM) atau *common effect model* (CEM). Hipotesis yang digunakan dalam Uji Chow adalah sebagai berikut:

1. H0: maka model estimasi yang terbaik digunakan adalah *common effect*.
2. H1: maka model estimasi yang terbaik digunakan adalah *fixed effect*.

Ketentuannya, apabila nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka H0 diterima, artinya model *common effect* yang akan digunakan, tetapi jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H1 diterima, berarti menggunakan pendekatan *fixed effect*. Berikut hasil pengujian untuk memilih apakah estimasi yang terbaik adalah *fixed effect* (FE) atau *common effect* (CE) dengan Uji Chow yang disajikan pada tabel 4 sebagai berikut.

Berdasarkan Tabel 5 hasil Uji Hausman diketahui bahwa nilai Prob. Chi2 lebih besar dari 0,05 yaitu 0,2193. Maka H0 diterima yang berarti model terbaik yang harus digunakan adalah *random effect model* (REM) daripada *fixed effect model* (FEM).

Uji Lagrange Multiplier

Setelah melakukan Uji Hausman dan memilih estimasi yang terbaik adalah *random effect model* daripada *fixed effect model* daripada, maka kemudian dilakuakn Uji Lagrange Multiplier untuk menentukan kembali model yang lebih baik antara *common effect model* atau *random effect model*. Hipotesis yang digunakan dalam Uji Lagrange Multiplier sebagai berikut.

1. H0: Probability both breusch pagan > 0,05, maka *common effect* adalah valid digunakan.
2. H1: Probability both breusch pagan < 0,05, maka *random effect* adalah valid digunakan.

Ketentuannya, apabila nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka H0 diterima, artinya model *common effect model* yang digunakan. Tetapi, jika nilai probabilitas < 0,05, maka H1 diterima, berarti menggunakan pendekatan *random effect model*. Berikut hasil pengujian untuk memilih apakah model estimasi terbaik adalah *common effect* atau *random effect* dengan Uji Lagrange Multiplier yang disajikan pada tabel 4.8 sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

$$y[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t]$$

Estimated results:

	Var	SD = sqrt(Var)
y	1.18469	1.088435
e	.003209	.0566482
u	0	0

Test: Var(u) = 0

chibar2(01) = 0.00
 Prob > chibar2 = 1.0000

Berdasarkan Tabel 6. hasil Uji *Lagrange Multiplier* diketahui bahwa nilai Prob. Chi2 lebih besar > dari 0,05 yaitu 1,000. Maka H0 diterima yang berarti model terbaik yang harus digunakan adalah *common effect model* (CEM) daripada *random effect model* (REM).

Berdasarkan hasil Uji Chow dapat diketahui bahwa model yang lebih baik adalah CEM daripada FEM. Adapun dari hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa REM juga lebih baik daripada FEM. Maka perlu dilakukan uji lanjutan yaitu Uji *Lagrange Multiplier* untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara CEM dengan REM. Setelah dilakukan 3 (tiga) uji penentuan model estimasi maka di dapatkan model estimasi yang paling baik adalah *common effect model* (CEM).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendapat hasil regresi *Best Linier Unbiased Estimator* atau yang disebut dengan BLUE. Model yang baik maka harus memenuhi asumsi klasik, yaitu data residual harus berdistribusi secara normal, tidak adanya gejala multikolinearitas dan heteroskedasitas dalam model penelitian.

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan sebagai prasyarat analisis data. Uji normalitas dilakukan sebelum mengolah data berdasarkan model penelitian yang diusulkan.

Uji normalitas penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Skewness/Kurtosis. Hasil uji normalitas disajikan pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas
Skewness and kurtosis tests for normality

Variable	Obs	Pr(skewness)	Pr(kurtosis)	Joint test	
				Adj chi2(2)	Prob>chi2
res	45	0.2847	0.4922	1.71	0.4263

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
res	45	0.96349	1.581	0.971	0.16584

Shapiro-Francia W' test for normal data

Variable	Obs	W'	V'	z	Prob>z
res	45	0.96869	1.503	0.765	0.22226

Berdasarkan tabel 7, maka dapat dilihat bahwa variable yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki data yang berdistribusi normal karena masing-masing nilai Prob>Chi2 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD, dana perimbangan, belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah telah memenuhi asumsi uji normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kuat/semipurna antar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Suatu model penelitian dikatakan baik jika multikolinearitasnya rendah. Hal ini dikarenakan ketika multikolinearitas tinggi, model tidak dapat memisahkan pengaruh parsial variabel independen yang satu terhadap variabel independen lainnya. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas pada penelitian menggunakan STATA dapat dideteksi dengan uji VIF (*Variance Inflation Factor*). Berikut tabel hasil pengujian multikolinearitas berdasarkan VIF (*Variance Inflation Factor*) sebagai berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
x1	3.55	0.281794
x2	3.55	0.281829
z	1.00	0.997950
Mean VIF	2.70	

Berdasarkan tabel 8 diketahui nilai VIF nilai mean VIF sebesar 2,70. Sehingga hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.10 diatas menerangkan bahwa data yang digunakan dalam model penelitian ini sudah tidak mengandung multikolinearitas karena nilai mean VIF yang tidak lebih besar dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas di dalam model penelitian ini. Jika terdapat gejala heteroskedastisitas maka hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya ketidakseragaman di dalam variasi model dan menyebabkan *error* menjadi tidak konsisten. Berikut tabel 4.11 yang merupakan hasil pengujian heteroskedastisitas.

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

```
. hettest

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Assumption: Normal error terms
Variable: Fitted values of x1

H0: Constant variance

      chi2(1) =    1.23
Prob > chi2 = 0.2670
```

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 9 menunjukkan bahwa nilai *probability* di atas 0,05 yakni sebesar 0,2670 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas maka asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

Uji Hipotesis Penelitian

Analisis Regresi Linear Berganda dengan Data Panel

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan data panel *common effect model* (CEM) untuk mengetahui gambaran mengenai pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pada pemilihan metode estimasi bagian sebelumnya dapat diketahui bahwa metode estimasi yang terbaik digunakan dalam penelitian ini adalah *common effect model* (CEM). Berikut hasil analisis regresi linear berganda data panel dengan menggunakan *common effect model* (CEM) yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dengan Data Panel

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	45
				F(2, 42)	=	6248.67
Model	51.9517609	2	25.9758805	Prob > F	=	0.0000
Residual	.174595014	42	.004157024	R-squared	=	0.9967
				Adj R-squared	=	0.9965
Total	52.1263559	44	1.18468991	Root MSE	=	.06447

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
x1	.9815107	.0300863	32.62	0.000	.920794 1.042227
x2	-1.012307	.034762	-29.12	0.000	-1.08246 -.9421545
_cons	-.1020976	.0664573	-1.54	0.132	-.2362139 .0320187

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa persamaan atas regresi data panel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$Y = -0,102 + 0,981X_1 + -1,012X_2 + ex$$

Berdasarkan persamaan regresi maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Konstanta (a) = -0,102 menunjukkan nilai konstan, Adapun jika nilai semua variabel independent sama dengan nol, maka variabel kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) sama dengan -0,102. Konstanta negatif umumnya terjadi jika rentang nilai yang cukup dekat antara variabel X dan Y.
2. Koefisien PAD (X1) = 0,981, artinya berdasarkan penelitian ini jika variabel lain nilainya tetap dan PAD mengalami kenaikan satu satuan maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah juga mengalami kenaikan sebesar 0,981.

3. Koefisien Dana Perimbangan (X_2) = -1,012, artinya berdasarkan penelitian ini jika variabel lain nilainya tetap dan dana perimbangan mengalami kenaikan satu satuan maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah juga mengalami penurunan sebesar -1,012.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada dasarnya mengukur seberapa baik suatu model dapat menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai berkisar dari 0 hingga 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sebaiknya jika R² besar (mendekati nilai 1 berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen semakin besar. Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Number of obs	=	45
F(5, 39)	=	3279.61
Prob > F	=	0.0000
R-squared	=	0.9976
Adj R-squared	=	0.9973
Root MSE	=	.05631

Berdasarkan tabel 11 diketahui besarnya nilai Adjusted R Square (R²) adalah sebesar 0,9973 yang berarti sebesar atau 99,73% variabel independen yaitu PAD dan Dana Perimbangan mampu menjelaskan atau menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Sisanya sebesar 0,27% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji Statistik Z (Parsial)

Uji statistik z dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil uji z pada model penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 12. Hasil Uji Statistik Z (Parsial)

y	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
x1	.9815107	.0300863	32.62	0.000	.9225426	1.040479
x2	-1.012307	.034762	-29.12	0.000	-1.080439	-.9441748
_cons	-.1020976	.0664573	-1.54	0.124	-.2323516	.0281563
sigma_u	0					
sigma_e	.06183694					
rho	0	(fraction of variance due to u_i)				

Berdasarkan tabel 12 diketahui hasil uji z model penelitian ini yang akan dibandingkan dengan taraf signifikan 5% atau 0,05. Berdasarkan tabel 4.14 didapat hasil analisis regresi dengan data panel yang diketahui PAD memiliki nilai prob. Z sebesar 0.000 < 0.05, artinya PAD secara parsial terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Perimbangan diketahui memiliki nilai prob. Z sebesar 0.000 < 0.05, artinya Dana Perimbangan secara parsial terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji z yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2019-2023 maka H1 dan H2 diterima.

Uji Moderasi Interaksi

Hubungan antara variabel independen dan dependen dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang disebut variabel moderator yang tidak dimasukkan dalam model statistik. Variabel moderasi adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja modal. Untuk mengetahui apakah belanja modal dapat digunakan sebagai variabel moderasi untuk memperkuat atau melemahkan penelitian ini dapat dilihat dari nilai probabilitas < taraf sig 0,05 dan pernyataan hipotesis dalam penelitian ini. Hasil uji moderasi interaksi dapat dilihat berdasarkan pada tabel berikut.

Tabel 13. Hasil Uji Moderasi Interaksi

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	45
Model	52.0026763	5	10.4005353	F(5, 39)	=	3279.61
Residual	.123679605	39	.003171272	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.9976
				Adj R-squared	=	0.9973
Total	52.1263559	44	1.18468991	Root MSE	=	.05631

y	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
x1	.9336619	.0346112	26.98	0.000	.8636541 1.00367
x2	-1.163809	.0698085	-16.67	0.000	-1.30501 -1.022608
z	.0407585	.0204252	2.00	0.053	-.0005553 .0820723
x1z	.0528793	.0189767	2.79	0.008	.0144954 .0912633
x2z	.0671697	.0249732	2.69	0.010	.0166568 .1176827
_cons	-.2101701	.1126258	-1.87	0.070	-.4379774 .0176372

Tabel 13 menunjukkan interaksi antara variabel moderasi yaitu Belanja Modal dengan masing-masing variabel independent yaitu PAD dan dana perimbangan. Berdasarkan hasil tersebut X1Z adalah interaksi antara belanja modal dengan PAD yang memiliki nilai prob. 0,008 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja modal mampu memperkuat pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena nilai sig < 0.05, maka dalam hal ini H3 diterima. Nilai probabilitas dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai sig 0,010 < 0.05, maka dalam hal ini H4 diterima.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil regresi pengaruh langsung PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa Tingkat Pertumbuhan PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sehingga H1 diterima. Nilai prob. Z sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Selain itu X1 memiliki nilai koefisien 0,981 yang menunjukkan angka positif. Sehingga tingkat pertumbuhan PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan di setiap masing-masing daerah. Sehingga dengan melihat hasil statistik tersebut membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diproyeksikan dengan kemandirian daerah dengan semakin meningkatnya persentase PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah maka dapat dikatakan kemandirian suatu daerah akan menjadi lebih baik.

Dalam teori keagenan, terdapat konflik potensi kepentingan antara principal dan agent. Pemerintah daerah (agent) bertugas untuk mengelola sumber daya daerah, termasuk

mengoptimalkan PAD. Principal berharap agar pemerintah daerah bertindak efisien dan akuntabel dalam penggunaan PAD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PAD menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar PAD, semakin besar pula kapasitas pemerintah untuk menyediakan layanan publik, tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat.

Hubungan keagenan menekankan pentingnya pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengelolaan PAD yang baik dan transparan akan mencerminkan peningkatan kinerja keuangan. Jika pemerintah daerah mampu meningkatkan PAD melalui kebijakan yang efektif, seperti optimalisasi pajak daerah dan retribusi, maka kinerja keuangan akan meningkat. Secara teori, peningkatan PAD berkontribusi langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli yang lebih besar memungkinkan pemerintah untuk memiliki ruang fiskal yang lebih besar, mendanai proyek pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik. Ini berdampak positif pada kinerja keuangan, karena pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dan mampu mengelola anggaran dengan lebih efisien.

Kaitan dengan teori stewardship, kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik adalah hasil dari pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif. Dengan mengelola PAD secara bertanggung jawab, pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan. Ini tercermin dalam indikator kinerja keuangan, seperti peningkatan pendapatan, efisiensi pengeluaran, dan akuntabilitas anggaran. Dengan prinsip stewardship, pemerintah daerah memiliki insentif untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan PAD, misalnya melalui penguatan potensi pariwisata, pajak daerah, atau retribusi yang dikelola secara transparan dan partisipatif.

Pengaruh Dana Perimbangan Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil regresi pengaruh langsung menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sehingga H2 diterima. Nilai prob. Z sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Selain itu X2 memiliki nilai koefisien sebesar -1,012 yang menunjukkan angka negatif. Sehingga Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat mencerminkan tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi serta bersifat terikat tersebut membuat daerah tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan tersebut sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit tercapai jika pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan.

Dana Perimbangan terdiri dari tiga komponen utama: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan membantu daerah dalam melaksanakan tugas-tugas desentralisasi. Kaitannya dengan teori keagenan, pemerintah daerah (sebagai agent) bertindak untuk kepentingan pemerintah pusat dan masyarakat (principal). Namun, ketergantungan yang besar terhadap Dana Perimbangan bisa mengurangi insentif bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan lokal mereka, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan terjadi karena daerah yang terlalu bergantung pada Dana Perimbangan cenderung memiliki kemandirian fiskal yang rendah. Hal ini mempengaruhi kinerja keuangan daerah, karena ketergantungan yang tinggi membuat daerah kurang berinovasi dalam meningkatkan pendapatan sendiri.

Asimetri informasi antara pemerintah pusat (principal) dan pemerintah daerah (agent) juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah. Pemerintah pusat mungkin tidak sepenuhnya memahami kondisi spesifik di setiap daerah, sehingga alokasi Dana Perimbangan mungkin tidak selalu tepat atau proporsional dengan kebutuhan sebenarnya. Ketika alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan riil, daerah mungkin menggunakan Dana Perimbangan secara tidak efektif, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan secara negatif. Hal ini dapat dikatakan bagaimana agency problem dalam bentuk asimetri informasi dapat memengaruhi hubungan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain hal tersebut sesuai dengan prinsip stewardship menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam mengelola sumber daya daerah. Namun, ketergantungan pada dana perimbangan dapat mengurangi dorongan untuk berinovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah yang terlalu bergantung pada alokasi dana pusat mungkin tidak terdorong untuk mencari cara-cara baru dalam meningkatkan efisiensi atau menemukan sumber pendapatan alternatif. Dalam hal ini, ketergantungan pada Dana Perimbangan dapat menghambat upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD atau merancang kebijakan fiskal yang lebih efektif. Akibatnya, kinerja keuangan bisa terhambat karena tidak ada peningkatan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan lokal.

Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai koefisien untuk variabel interaksi antara PAD dengan belanja modal sebesar 0,0528 dengan tingkat probability sebesar 0,008 yang artinya lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Sehingga H3 diterima yakni Belanja Modal memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Menurut (Mardiasmo, 2020) menyatakan secara substansif bahwa terdapat hubungan antara kemandirian daerah dengan pertumbuhan ekonomi yaitu “Dimana peran belanja modal sangat penting dalam meningkatkan infrastruktur publik sehingga dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi”. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal dan semakin tinggi belanja modal akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi, Jika pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah itu tinggi maka tingkat kemandirian daerah juga tinggi. Suatu daerah yang mempunyai tingkat PAD yang tinggi akan mencerminkan tingginya kemandirian daerah, sehingga PAD tersebut harus dialokasikan lebih besar untuk mendanai anggaran belanja modal. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah untuk fasilitas dan infrastruktur baik untuk fasilitas pemerintah maupun publik Kuntari, et.al (2019). Hal ini berkaitan dengan agensi teori dimana penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang kemudian laporan ini digunakan oleh masyarakat sebagai dasar untuk penilaian kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah termasuk mengelola keuangan daerah.

Belanja infrastruktur pelayanan publik yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan PAD. Ketika dana PAD digunakan untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, hal ini dapat mengurangi biaya operasional pemerintah daerah di masa depan dan meningkatkan efisiensi pengeluaran. Sebagai contohnya pembangunan jalan yang baik dapat mengurangi biaya transportasi dan distribusi barang, sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Efisiensi ini akan berdampak positif pada kinerja keuangan daerah. Investasi yang cermat dalam infrastruktur pelayanan publik juga dapat mendorong peningkatan PAD di masa mendatang. Infrastruktur yang baik akan menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan aktivitas ekonomi yang menghasilkan lebih banyak penerimaan pajak dan retribusi bagi daerah. Dengan demikian, belanja infrastruktur tidak hanya memanfaatkan

PAD yang ada, tetapi juga menciptakan pendapatan yang berkelanjutan di masa depan, yang pada akhirnya memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Dana Perimbangan Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai koefisien untuk variabel interaksi antara dana perimbangan dengan belanja modal sebesar 0,067 dengan tingkat probability sebesar 0,010 yang artinya lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Sehingga H4 diterima yakni Belanja Modal memperkuat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berperan signifikan dalam mendukung kegiatan pemerintahan daerah, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya lokal. Meskipun Dana Perimbangan berfungsi sebagai bantuan dari pusat, efektivitas penggunaan dana ini terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sangat tergantung pada bagaimana dana tersebut dikelola, terutama dalam alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik.

Dana Perimbangan memiliki dua fungsi utama: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan publik, dan (2) mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Dengan adanya Dana Perimbangan, pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tetap menjalankan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan publik. Namun, ketergantungan yang tinggi pada Dana Perimbangan tanpa didukung oleh peningkatan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan dapat berpotensi menurunkan kinerja keuangan daerah. Dalam beberapa kasus, daerah yang terlalu bergantung pada transfer pusat mungkin kurang terdorong untuk meningkatkan PAD atau mengelola sumber daya mereka dengan lebih baik, yang pada akhirnya bisa melemahkan kinerja keuangan secara keseluruhan.

Dana perimbangan merupakan hasil dari kebijakan desentralisasi fiskal yang diatur melalui regulasi pemerintah pusat. Implikasinya, belanja modal dapat dianggap sebagai alat untuk memenuhi aturan penggunaan dana perimbangan secara efisien dan efektif. Regulasi ini memastikan bahwa alokasi dana perimbangan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Ketika belanja infrastruktur diarahkan pada proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka belanja infrastruktur pelayanan publik berperan sebagai faktor moderasi yang dapat memperkuat dana perimbangan terhadap kinerja keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2019-2023 dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ini berarti semakin meningkatnya persentase PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah maka dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproyeksikan dengan kemandirian suatu daerah akan menjadi lebih baik. Hasil ini mendukung teori keagenan dan stewardship dimana secara teori, peningkatan PAD berkontribusi langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli yang lebih besar memungkinkan pemerintah untuk memiliki ruang fiskal yang lebih besar, mendanai proyek pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik.
2. Dana Perimbangan (X2) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ini berarti semakin besar dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat mencerminkan tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah rendah. Asimetri informasi antara pemerintah pusat (principal) dan pemerintah daerah (agent) juga dapat

- menjadi faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah. Pemerintah pusat mungkin tidak sepenuhnya memahami kondisi spesifik di setiap daerah, sehingga alokasi Dana Perimbangan mungkin tidak selalu tepat atau proporsional dengan kebutuhan sebenarnya.
3. Belanja Modal (Z) secara signifikan memperkuat pengaruh hubungan PAD dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal dan semakin tinggi belanja modal akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah itu tinggi maka tingkat kemandirian daerah juga tinggi. Investasi yang cermat dalam infrastruktur pelayanan publik juga dapat mendorong peningkatan PAD di masa mendatang. Infrastruktur yang baik akan menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan aktivitas ekonomi yang menghasilkan lebih banyak penerimaan pajak dan retribusi bagi daerah.
 4. Belanja Modal (Z) secara signifikan memperkuat pengaruh hubungan Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti Dana Perimbangan berperan signifikan dalam mendukung kegiatan pemerintahan daerah, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya lokal. Meskipun Dana Perimbangan berfungsi sebagai bantuan dari pusat, efektivitas penggunaan dana ini terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sangat tergantung pada bagaimana dana tersebut dikelola, terutama dalam alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik.

REFERENSI

- Akita, T., Riadi, A. A., & Rizal, A. (2021). Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era: Does general allocation fund equalize fiscal revenues? *Regional Science Policy & Practice*, 13(6), 1842–1866.
- Aminuddin, N., & Winarningsih, S. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah. *Journal of Economics and Business UBS*, 13(1), 404–427.
- Capkova, S., & Roncakova, L. (2014). Fiscal equalization and regional growth. *European Scientific Journal*.
<https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=b3ea78f66d663db5e818092ab538867f6ff87f8e#page=387>
- Hamid, A. A. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka–Jawa Barat. *Jurnal Sekuritas*, 1(4), 38–51.
- Kou, G., Xu, Y., Peng, Y., Shen, F., Chen, Y., Chang, K., & Kou, S. (2021). Bankruptcy prediction for SMEs using transactional data and two-stage multiobjective feature selection. *Decision Support Systems*, 140, 113429.
- Maher, C. S., Hoang, T., & Hindery, A. (2020). Fiscal Responses to COVID -19: Evidence from Local Governments and Nonprofits. *Public Administration Review*, 80(4), 644–650. <https://doi.org/10.1111/puar.13238>
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Muliati, M., Ruma, Z., Anwar, A., Budiyantri, H., & Aslam, A. P. (2024). Perencanaan dan Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa. *Journal of Management and Social Sciences*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.55606/jimas.v3i3.1468>
- Panji, I. P. B., & Indrajaya, I. G. B. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 5(3), 316–337.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 12 (2019).

- Suandani, K. P., & Astawa, G. P. B. (2021). Pengaruh opini audit, belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(3), 728–739.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 1 (2022).
- Wu, H., Li, Y., Hao, Y., Ren, S., & Zhang, P. (2020). Environmental decentralization, local government competition, and regional green development: Evidence from China. *Science of The Total Environment*, 708, 135085. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135085>